

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DINAMIS (*DYNAMIC GOVERNANCE*) DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM BUNGA KAMPUNG (BUPATI NGANTOR DI KAMPUNG) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Saddam Al-Yasri Firstya
NPP. 31.0325

Asdaf Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: saddam.af2001@gmail.com
Pembimbing Skripsi: Dr. Anwar Rosshad, S.H, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author focuses on the phenomenon of unequal distribution of public services due to large areas with dense populations, infrastructure development that has not been optimal and bureaucratic reform that has not been realized significantly in the Central Lampung region. This is a demand for the Central Lampung Regency Government to adapt and respond to the dynamics of public service problems by looking at culture and capabilities through implementing the Bunga Kampung program which then leads to positive changes for society. Objective: The aim of this research is to describe and analyze how the Central Lampung Regency Government manages the Bunga Kampung program. Method: This research uses a descriptive qualitative approach and analysis of dynamic governance according to the Dynamic Governance Theory of Neo and Chen (2007). Data collection techniques were carried out using observation, in-depth interviews (13 informants), and documentation. Results/Findings: The findings obtained by the author in this research are divided based on three main elements of Dynamic Governance, namely the culture element, the dynamics that occur are influenced by the central, provincial and political will of regional heads in terms of consistency and long term in solving public service problems. In the capability element, dynamics occur through a process of thinking ahead, reviewing and learning from other experiences. And in the change element, positive changes were found and suggestions for appropriate decision making were considered adaptive by researchers based on findings in the field. Conclusion: The Central Lampung Regency Government's implementation of governance regarding public service issues through the Bunga Kampung program has resulted in positive changes. Suggestions from researchers are several things that need to be done, such as integrating with other regional governments to jointly overcome public service problems, increasing infrastructure development to support the success of government programs, and increasing the digital capabilities of society evenly. Therefore, researchers hope that the Central Lampung Regency Government can evaluate and re-implement this program in the next period with various innovations to provide wider benefits for the community by considering the results of the change element.*

Keywords: *Government Dynamics, Government Governance, Public Services, Bunga Kampung, Central Lampung Regency*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada fenomena belum meratanya pelayanan publik akibat luas wilayah dengan penduduk yang padat, pembangunan infrastruktur yang belum optimal serta reformasi birokrasi yang belum terwujud secara signifikan di wilayah Lampung Tengah. Hal ini menjadi tuntutan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk beradaptasi dan merespon dinamika permasalahan pelayanan publik dengan melihat budaya dan kapabilitas melalui penyelenggaraan program Bunga Kampung yang kemudian mengarah kepada perubahan yang positif bagi masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana tata kelola Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam penyelenggaraan program Bunga Kampung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif secara deskriptif dan analisis terhadap tata kelola pemerintahan dinamis menurut Teori *Dynamic Governance* dari Neo dan Chen (2007). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (13 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu terbagi berdasarkan tiga elemen utama *Dynamic Governance* yakni pada elemen *culture*, dinamika yang terjadi mengalami pengaruh dari pemerintah pusat, provinsi dan *political will* kepala daerah dalam hal konsistensi dan berjangka panjang dalam penyelesaian masalah pelayanan publik. Pada elemen *capabilities*, dinamika yang terjadi melalui proses berpikir ke depan, mengkaji ulang, dan belajar dari pengalaman yang lain. Serta pada elemen *change* didapati perubahan yang positif serta saran terhadap pengambilan keputusan yang tepat dinilai adaptif oleh peneliti berdasarkan temuan lapangan. **Kesimpulan:** Penyelenggaraan tata kelola Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terkait permasalahan pelayanan publik melalui program Bunga Kampung telah menghasilkan perubahan yang positif. Saran dari peneliti terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan seperti melakukan integrasi dengan pemerintah daerah lain untuk bersama mengatasi permasalahan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang keberhasilan program pemerintah, dan meningkatkan kemampuan digital masyarakat secara merata. Maka dari itu, peneliti berharap agar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dapat mengevaluasi dan melaksanakan kembali program ini di periode selanjutnya dengan berbagai inovasi guna memberikan kebermanfaatannya lebih luas bagi masyarakat dengan mempertimbangkan hasil pada elemen *change*.

Kata Kunci: Dinamika Pemerintahan, Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik, Bunga Kampung, Kabupaten Lampung Tengah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya untuk berkembang dalam meraih Indonesia emas di 2045 terus dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan berdasar pada salah satu dari tujuan negara sekaligus merupakan cita-cita bangsa yakni memajukan kesejahteraan umum, berbagai strategi telah disusun oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwasanya Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi. Dalam pelaksanaan desentralisasi tersebut diperlukan penataan daerah yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Realisasi dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam memajukan kesejahteraan umum terlihat pada pelaksanaan pelayanan publik. Secara sederhana, pelayanan publik merupakan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan yang diuraikan pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan upaya pemenuhan hak pada setiap warga negara meliputi pelayanan bidang barang, jasa dan administratif. Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah seringkali menghadapi permasalahan permasalahan publik yang terjadi secara kompleks dan dinamis sehingga pemerintah harus senantiasa merespon kondisi tersebut dengan tepat.

Berkaca pada tuntutan reformasi Indonesia tahun 1998, bahwasanya tata kelola pemerintahan pada era otonomi daerah saat ini harus dilaksanakan dalam pemenuhan pelayanan publik. Hal yang membekas sebagai catatan hitam tata kelola pemerintahan pada rezim Orde Baru diantaranya berkaitan pada transparansi, banyaknya peraturan yang tumpang tindih, birokrasi yang panjang dan perilaku birokrat yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehingga ini berdampak kepada terhambatnya proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pelayanan publik, menurunnya kinerja dari pembangunan ekonomi maupun sosial serta rusaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Sukoco, 2023). Selain itu, situasi yang berkembang di masyarakat lewat krisis maupun konflik yang terjadi juga akan mempengaruhi stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat pada ujian dinamika tata kelola pemerintahan. Dinamika perkembangan lingkungan dalam masyarakat yang semakin kompleks juga akan berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan mulai dari perencanaan, proses hingga pelaksanaan dari penyelenggaraan pemerintahan.

Melihat situasi dan kondisi yang berkembang, setiap daerah saat ini sedang berlomba lomba dalam melakukan inovasi pemerintahan sebagaimana yang dipertegas pada Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan upaya inovasi daerah dengan salah satu prinsip berorientasi kepada kepentingan umum lewat penerapannya pada pelayanan publik. Komitmen melalui kemauan politik (*political will*) dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat juga sejalan dengan janji kampanye politik oleh Bupati Musa Ahmad selaku Kepala Daerah Lampung Tengah terpilih Periode 2021-2024. Dengan mempertimbangkan langkah pembangunan jangka panjang daerah, potensi, persoalan dan tantangan pembangunan yang terjadi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2021 – 2026 dengan memasukkan indikator kepuasan masyarakat atas pelayanan publik sebagai salah satu target capaian dari Misi ke 5 yakni “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik”. Salah satunya melalui terobosan dalam inovasi pelayanan publik yakni Program Bunga Kampung (Bupati Ngantor di Kampung) di Kabupaten Lampung Tengah.

Bukan sesuatu yang mudah bagi Bupati Musa Ahmad selaku kepala daerah yang baru terpilih dalam mencapai visi misi nya yang tertuang pada RPJMD Lampung Tengah 2021-2026 mengingat Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung (13,57 persen dari total luas wilayah Provinsi Lampung) dengan total luas wilayah mencapai 4.545,50 km² (BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2021). Selain pada wilayah yang luas, penduduk di wilayah Lampung Tengah juga tergolong pada jumlah yang padat mencapai 1.447.395 jiwa (BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2021).

Dengan luas wilayah mencapai 4.545,50 km² dan secara administratif terbagi menjadi 28 kecamatan dengan 301 kampung dan 10 kelurahan, dalam hal bidang pembangunan infrastruktur jalan, dari total jalan kabupaten sepanjang 1.343,326 km, tingkat kemandapan jalan masih berada pada angka 61,9% pada tahun 2020 atau masih terdapat sepanjang 511,612 km jalan dalam kondisi rusak (RPJMD Kab. Lampung Tengah 2021-2026). Fenomena ini menunjukkan perlunya optimalisasi konektivitas antar wilayah terutama pada infrastuktur jalan, karena pada realitanya hal ini mempersulit akses bagi masyarakat dalam mobilisasi termasuk pada proses untuk mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah yang akhirnya berdampak

terhadap tata kelola pemerintahan dalam menunjang program-programnya. Selain itu, Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 menunjukkan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Kabupaten Lampung Tengah belum optimal sehingga masih masuk pada kategori “B” dengan nilai 63,52 poin.

Dari adanya permasalahan yang timbul, adapun hubungan diantara permasalahan tersebut yang merupakan bagian dari sektor prioritas pembangunan daerah yaitu pembangunan bidang infrastruktur, reformasi birokrasi dengan tantangan tata kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik memiliki keterkaitan satu sama lain. Inovasi pelayanan publik bernama “Bunga Kampung” merupakan program pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat baik dari kemudahan, kedekatan, efisiensi waktu maupun pembiayaan (Setiawan, 2022). Komitmen melalui kemauan politik (*political will*) dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mengatasi dinamika permasalahan di masyarakat terutama pada sektor pembangunan infrastruktur dan reformasi birokrasi sekaligus memenuhi janji kampanye politik terkait inovasi pelayanan publik melalui penerapan program bernama “Bunga Kampung” atau Bupati Ngantor di Kampung dapat dianalisis dengan menggunakan teori *Dynamic Governance System*, Neo dan Chen (2007) dengan melihatnya dari perspektif “*how the government's ability to respond to future societal developments through early signs that may affect the country's condition*”. Yakni kemampuan pemerintah dalam merespon 12 perkembangan masyarakat ke depan melalui tanda-tanda awal yang dapat berpengaruh terhadap kondisi negara (Aligica et al., 2019).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung yakni 4.545,50 km² dan penduduk mencapai angka 1.447.395 jiwa. Dengan kondisi tersebut, pelayanan pemerintahan yang masih berpusat di ibukota kabupaten hingga tingkat kemandirian jalan yang masih baru mencapai angka 61,9% di tahun 2020 akan berdampak terhadap biaya tinggi bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan itu sendiri sehingga berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat kemudian hari apabila tidak segera direspon dengan baik oleh pemerintah. Selain itu, dari segi birokrasi ditujukan penilaian LAKIP pada tahun 2020 serta banyaknya aduan dari masyarakat terkait banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas.

Program Bunga Kampung (Bupati Ngantor di Kampung) sudah diatur dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 pada Visi ke-8 yakni Pelayanan Berjaya. Namun pada pelaksanaan selama kurang lebih 3 tahun, pelayanan publik yang dihadirkan belum menyeluruh menjangkau kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dan juga penerapannya masih cenderung tidak sesuai karakteristik tiap kampung sesuai dengan rencana awal. Selain itu, aspirasi yang diberikan langsung oleh masyarakat belum terakomodir secara baik. Penerapan suatu program pemerintah juga perlu didasarkan pada kemampuan pemimpin dalam mengaktualisasikan segala kepentingan masyarakat berdasar aspirasi yang diberikan secara langsung. Karena ini menyangkut bukan hanya pelayanan melainkan kemauan politik (*political will*) melalui percepatan pembangunan dalam rangka memenuhi janji kampanye politik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terutama pada elemen yang terdapat dalam teori *Dynamic Governance*. Hasil penelitian sebelumnya ini dijadikan penulis sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian. Penelitian Ferdy Yanuar, berjudul “Penerapan Dynamic Governance Terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi Di Kota Depok” (Yanuar, 2023), menemukan bahwa terdapat berbagai pengaruh dari elemen *culture* yang dilihat dari pengaruh dalam aktivitas negara, pertumbuhan pada jumlah penduduk dan bantuan RTRH, perencanaan jangka panjang serta kebijaksanaan dalam implementasi kebijakan oleh Pemerintah Kota Depok. Selain itu, pada elemen *capabilities* Pemerintah Kota Depok telah menerapkan ketiga aspek yakni *thinking ahead* dimana terdapat tiga hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok yang bersifat jangka panjang atau berpikir kedepan seperti telah membuat isu strategis dan telaah kajian permasalahan, *thinking again* Pemerintah Kota Depok telah membuat banyak kebijakan yang dituangkan kedalam berbagai peraturan serta banyak program yang ada dibuat untuk mengatasi persoalan tata kelola permukiman akibat dampak urbanisasi, dan *thinking across* Pemerintah Kota Depok telah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat dikarenakan pemerintah pusat memiliki ahli yang lebih baik dan memiliki program yang saling terkait. Serta pada elemen *change* terjadi perubahan ke arah positif terhadap isu permasalahan bidang perumahan dan permukiman akibat urbanisasi. Penelitian Amalia Ilmia Sari dan Zaili Rusli dengan judul “Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (*Dynamic Governance*) dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru” (Sari dan Rusli, 2022), menemukan elemen *capabilities* yakni *thinking ahead* menghasilkan upaya membantu organisasi dan para pemimpinnya membangun perspektif tentang serangkaian masa depan yang masuk akal. *Thinking again* menghasilkan pengumpulan data evaluasi KLA dilakukan dengan melibatkan pihak OPD terkait sesuai dengan Tim Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak yang telah dibentuk. Dan *thinking across* menghasilkan perbedaan karakteristik sangat dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan di Kota Pekanbaru. Penelitian Yuni Kartika, Nur Khaerah dan Fitriani Sari dengan judul “*Dynamic Governance* dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar” (Kartika dkk, 2020), menemukan elemen *capabilities* yakni *thinking ahead* menghasilkan suatu langkah antisipasi dalam bentuk sosialisasi terhadap pencemaran lingkungan yang mengedepankan pengawasan dan pengendalian stakeholder terkait, *thinking again* menghasilkan peninjauan dengan memaksimalkan kembali ruang terbuka hijau dengan teknologi dari satelit. Dan *thinking across* menghasilkan indikator adopsi pola yang diikuti dalam membangun ruang terbuka hijau melalui izin sebagai bagian karya pembangunan seperti negara Amerika dan Jepang. Penelitian Hisyam Yusril, Dyah Ayu dan Davis Malchiel dengan judul “Tinjauan *Dynamic Governance* dalam Mendukung Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan Menuju Wisata Halal” (Yusril dkk, 2019), menemukan elemen *capabilities* yakni *thinking ahead* menghasilkan adanya pembuatan masterplan oleh UPK PBB Setu Babakan dalam pembangunan kawasan PBB Setu Babakan yang sesuai dengan kebutuhan destinasi wisata halal yang diinginkan oleh pemerintah. *Thinking again* menghasilkan peninjauan ulang oleh Disparbud terkait peraturan yang sudah ada dan menghasilkan sebuah konklusi bahwa perlu adanya pergub baru yang dapat menjadi dasar perencanaan karena pergub maupun perda yang saat ini dibuat belum memuat mengenai perencanaan wisata halal yang baru muncul sejak 2018. Dan *thinking across* menghasilkan kerjasama oleh Disparbud dengan Tim Percepatan dan Pengembangan Kementerian Pariwisata, akademisi, dan pihak industri dalam memaksimalkan proses perencanaan dan kajian yang sedang dilakukan. Penelitian Khairul Ikhsan, Rumzi Samin dan Edy Akhyary

dengan judul “Implementasi *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Batam” (Ikhsan dkk, 2020), menemukan elemen *capabilities* yakni *thinking ahead* akan mendorong Mal Pelayanan Publik Kota Batam untuk menilai dan meninjau kembali strategi yang sedang berjalan, memperbaharui target dan tujuan, dan menyusun konsep baru yang disiapkan menyongsong masa depan dari instansi tersebut. *Thinking again* menghasilkan konsep bagaimana Mal Pelayanan Publik Kota Batam mengkaji untuk tata cara pembayaran tarif tagihan pelayanan agar terhindar dari stigma atau stereotip negatif soal pungutan liar atau pungli di ranah birokrasi pemerintahan. Dan *Thinking Across* menghasilkan bahwasanya Mal Pelayanan Publik Kota Batam sepenuhnya belajar dari kesuksesan *Public Service Hall* yang telah lama terselenggara di Negara Georgia dimana ini menyediakan pelayanan langsung (*front office*) yang memiliki tugas membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pelayanan yang mereka harapkan sedekat mungkin dan secepat mungkin pengurusannya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis dalam penelitian ini berfokus pada elemen *Dynamic Governance* terhadap penyelenggaraan program Bunga Kampung di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini memiliki konsep yang berbeda dengan penelitian tersebut yang mana perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya membahas membahas pada elemen *Capabilities* pada Teori *Dynamic Governance* yang terdiri dari *Thinking Ahead*, *Thinking Again*, *Thinking Across*. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tiga elemen dalam *Dynamic Governance* yaitu elemen *Culture*, *Capabilities*, dan *Change* terhadap penyelenggaraan program Bunga Kampung di Lampung Tengah sebagai inovasi pelayanan publik di tengah dinamika masyarakat terhadap kondisi wilayah dengan pembangunan infrastruktur dan budaya birokrasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tata kelola pemerintahan dinamis Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam merealisasikan Program Bunga Kampung dilihat dari elemen *culture*, *capabilities*, dan *change*.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2019). Metode kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2019).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan wawancara penulis secara mendalam melakukan diskusi terhadap 13 orang informan yang terdiri dari Pj. Sekretaris Daerah Lampung Tengah, Kepala Bappeda Lampung Tengah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Camat Kota Gajah, Kepala Kampung Kota Gajah Timur, Kepala Kampung Purworejo dan masyarakat. Adapun teknik analisis data yang dilakukan penulis yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:16).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis dinamika dalam penyelenggaraan program Bunga Kampung menggunakan teori *Dynamic Governance* (Neo dan Chen, 2007) yang terdiri dari elemen *culture* meliputi *state activism* (aktivitas negara), *long term* (rencana dan tujuan jangka panjang), dan *stability* (stabilitas). Kemudian elemen *capabilities* atau kapabilitas yang berupa *thinking ahead* (berpikir ke depan), *thinking again* (mengkaji ulang) dan *thinking across* (belajar dari pengalaman negara/organisasi lain), serta elemen *change* atau perubahan sebagai hasil dari adanya pengaruh antara elemen kapabilitas dan budaya yang didukung dengan adanya *able people* dan *agile process*. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Elemen Culture

Pada elemen pertama yaitu *culture* menjelaskan keterkaitan antara budaya organisasi dengan dinamika perubahan yang terjadi. Terdapat 3 aspek yang dianalisis meliputi:

A. Aspek State Activism

Pada elemen *culture* yang pertama yaitu *state activism* atau aktivitas pemerintahan. Dalam hal ini, terdapat campur tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten. Khususnya dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Sebagai contohnya, pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Lampung Tengah memiliki keterkaitan misi terutama dalam hal pelaksanaan pelayanan publik dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal tersebut dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian penulis selama berada di lapangan didapatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen dalam peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik melalui program Bunga Kampung yang merupakan produk original dari Musa – Ardito selaku Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah. Melihat dinamika yang terjadi di masyarakat terutama dalam kondisi birokrasi dan pembangunan infrastruktur sangat mempengaruhi tindakan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan program Bunga Kampung tersebut. Proses yang berjalan dimulai dari pertimbangan-pertimbangan awal yang meliputi pengetahuan awal tentang Bunga Kampung, kemampuan jajaran perangkat daerah dalam melakukan pelayanan di tiap lokasi, penerapan sikap yang ditunjukkan di lapangan dan penampilan Bunga Kampung. Perhatian, tindakan dan tanggungjawab merupakan hal yang sangat penting. Tentunya dalam pelaksanaan program inovasi pelayanan publik tersebut harus berpedoman juga terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Sehingga dalam hal ini akan menunjukkan kemampuan tata kelola pemerintahan Bupati Lampung Tengah dalam penyelenggaraan Program Bunga Kampung di tengah dinamika masyarakat yang sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

Selain itu, menurut masyarakat setempat hadirnya Program Bunga Kampung telah memberikan dampak terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, layanan keluarga berencana, pelayanan pajak dan sebagainya. Hal ini menunjukkan segala bentuk aktivitas pemerintahan yang digerakkan oleh *Political Will* Kepala Daerah berkontribusi secara signifikan dalam membentuk sistem birokrasi yang lebih efektif, transparan dan akuntabel ditengah meningkatkan kebutuhan masyarakat.

B. Aspek Long Term

Pada elemen *culture* yang kedua yaitu *long term* atau jangka panjang dimana pada penelitian ini melihat bahwa sejauh mana Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam setiap tindakan yang diambil terkait pelaksanaan Program Bunga kampung untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik apakah sudah bersifat jangka panjang atau berkelanjutan. Berdasarkan temuan di lapangan, permasalahan yang hadir ditengah pelaksanaan Program Bunga Kampung yakni melonjaknya jumlah masyarakat yang ingin dilayani lewat program tersebut. Sehingga program ini akan bersifat continue atau terus berlanjut karena kebutuhan akan pelayanan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari urusan pemerintahan wajib.

Berbicara tentang rencana jangka panjang bisa juga dengan rencana jangka pendek yang diberlakukan secara terus menerus. Dalam artian ketika konsisten menjalankan program Bunga Kampung ini secara terus menerus akan menyelesaikan persoalan jangka panjang di kemudian hari. Konsistensi dalam merealisasikan sebuah program merupakan bentuk realisasi dari tindakan yang bersifat jangka panjang yang dalam hal ini merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lampung Tengah.

C. Aspek *Stability*

Pada elemen *culture* yang ketiga yaitu *stability* atau stabilitas. Stabilitas yang dimaksud didalam penelitian ini yaitu sejauh mana program yang ada mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Dalam pelaksanaannya program ini yang dasarnya adalah produk original ataupun baru dalam periode pertamanya belum terlihat bagaimana stabilitasnya di periode selanjutnya. Namun ketika menelusuri lebih lanjut di lapangan, maka terjadi perubahan atau improvisasi dalam pelaksanaan Program Bunga Kampung tersebut tanpa merubah tujuan awal yakni dengan program turunan Bunga Kampung Mekar di Dusun. Dimana program Bunga Kampung yang awalnya hadir di tiap Kecamatan, kini telah hadir di Desa atau Kelurahan pada tiap tiap Kecamatan. Sehingga program ini cenderung stabil dalam pelaksanaan tujuannya namun berubah dalam teknis pelaksanaannya.

Upaya untuk mewujudkan stabilitas Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam penyelenggaraan program Bunga Kampung dilakukan dengan menjawab tantangan yang hadir di Tengah masyarakat terkait relevansi dan realisasi janji kampanye politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui jalinan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga nantinya akan menjadi investasi ke depan dalam pelayanan dan pembangunan Lampung Tengah.

3.2. Elemen *Capabilities*

Elemen kedua yaitu kapasitas (*capabilities*), dimana elemen ini menjadi fokus utama kajian ini karena berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menghadapi dinamika yang ada. Terdapat 3 aspek yang dianalisis meliputi:

A. Aspek *Thinking Ahead*

Kapabilitas yang pertama adalah *thinking ahead* atau berpikir ke depan. Kemampuan berpikir kedepan merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di masa depan agar dapat memahami dampaknya terhadap sosio-ekonomi masyarakat dan menghindari ancaman yang dapat menghambat kemajuan masyarakat. Setiap rencana yang dibuat berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu program Bunga Kampung dalam mewujudkan upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik menghadapi tantangan selain luas wilayah, kondisi pembangunan infrastruktur yang belum merata, dan kondisi birokrasi yang belum adaptif yaitu jumlah masyarakat yang ingin mengurus keperluan pelayanan terutama yang berkaitan dengan

pelayanan administrasi mengalami peningkatan yang signifikan di tengah pelaksanaan Bunga Kampung tiap Kecamatan. Sehingga hal ini berdampak terhadap program yang diterapkan dalam upaya yang nantinya tidak hanya menyelesaikan masalah yang sedang terjadi namun juga masalah yang akan datang akibat ketidakmenentuan kondisi di masa depan (*Future Uncertainties*).

Secara garis besar, tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam pelayanan administratif tersebut dibagi menjadi dua, yang pertama pelaksanaan Program Bunga Kampung bukan hanya sekedar memberikan pelayanan kepada masyarakat melainkan memicu kesadaran masyarakat dalam hal tertib administrasi kependudukan. Yang kedua adalah inovasi dalam pemberian alat cetak untuk keperluan pelayanan administrasi di tiap kecamatan. Sehingga nantinya masyarakat akan lebih mudah dalam mengurus administrasi tersebut yang secara tidak langsung juga pemerintah telah melakukan langkah-langkah terwujudnya reformasi birokrasi di Lampung Tengah.

Setiap jenis pelayanan tentu mengalami tantangannya tersendiri, dan ternyata tidak lepas dengan kondisi luas wilayah, jarak tempuh, sarana dan prasarana serta infrastruktur digital. Pemerintah Lampung Tengah telah berkomitmen sepenuh hati untuk menjaga antusiasme masyarakat dalam menunjang indeks kepuasan masyarakat melalui program inovasi pelayanan publik bernama Bunga Kampung. Terlaksananya sebuah program maupun aktivitas pemerintahan lain banyak dipengaruhi oleh *political will* dari sosok Kepala Daerah yang dalam hal ini merupakan pimpinan tertinggi. Sehingga, kemampuan pemimpin dalam mengajak aparaturnya untuk bergerak bersama merupakan hal yang sangat penting.

B. Aspek *Thinking Again*

Kapabilitas kedua adalah *Thinking Again* atau mengkaji ulang. Kapabilitas ini merupakan kemampuan untuk meninjau kembali berbagai program yang sedang diterapkan sehingga pada akhirnya output dari program yang sudah diterapkan dapat diperbaiki dan dimaksimalkan. Dalam hal ini, melihat sejauh mana keefektifan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui Program Bunga Kampung.

Dalam pelaksanaan Program Bunga Kampung di lapangan, ada beberapa hal yang ditemukan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan inovasi pelayanan publik tersebut. Pertama, berkaitan dengan pencapaian target dari pemerataan pelayanan publik tersebut dengan permasalahan yang sama yakni luas wilayah dan kondisi infrastruktur yang tentunya berkaitan dengan mobilitas masyarakat. Kedua, berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana yang berbeda tiap kecamatan sehingga berdampak terhadap percepatan pelayanan publik. Ketiga, berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang berdampak pada kemampuan yang berbeda tiap kecamatan dalam memeriahkan program tersebut. Keempat, berkaitan dengan optimalisasi kapasitas SDM yang memberikan pelayanan bagi Program Bunga Kampung dalam program.

Berdasarkan hasil penelitian, didapati bahwa ternyata evaluasi bulanan telah dilakukan dengan mencakup keempat permasalahan yang penulis rangkum di atas sehingga pada tahun berikutnya, Bupati Lampung Tengah menetapkan program turunan bernama “Bunga Kampung Mekar di Dusun” dimana hal ini bertujuan untuk mengefektifkan pemerataan pelayanan publik, meningkatkan kapasitas SDM, serta perbaikan sarana prasarana pada tiap kecamatan hingga kampung.

C. Aspek *Thinking Across*

Kapabilitas yang ketiga dan terakhir yaitu *Thinking Across* atau belajar dari pengalaman negara/organisasi lain). Kapabilitas ini merupakan kemampuan untuk mengambil pendapat, ide, dan pikiran lain di luar kerangka berpikir (*mindset*) yang telah ditetapkan secara tradisional dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan tertentu. Selama ini

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah belajar dan menerapkan beberapa ide-ide yang selama ini didapat melalui pengalaman dan juga saran pihak lain dalam hal ini pemerintah daerah lainnya. Namun dalam pelaksanaan inovasi pelayanan publik melalui Program Bunga Kampung ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tidak melakukan diskusi dengan pihak lain karena ini merupakan program original Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian didiskusikan secara internal dengan seluruh perangkat daerah terkait untuk kemudian tercipta teknis pembagian tugas yang efektif dalam menunjang keberhasilan program tersebut.

Dalam pelaksanaannya di lapangan melalui program turunan Bunga Kampung Mekar di Dusun, Camat hingga Kepala Kampung di wilayah Lampung Tengah saling berkoordinasi untuk kemudian menyelenggarakan program tersebut dengan tepat. Selama ini, pemerintah kecamatan hingga kampung telah saling berkomunikasi untuk belajar dan menerapkan ide ide terkait melalui saran evaluasi dari kecamatan ke kecamatan hingga kampung ke kampung.

Adapun langkah yang dilakukan yaitu pertama, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah membangun komunikasi dengan kecamatan hingga kampung terkait untuk berkonsultasi sebelum menyelenggarakan program Bunga Kampung ataupun Bunga Kampung Mekar di Dusun. Kedua, Pemerintah Kecamatan hingga Kampung telah melakukan studi banding kepada Kecamatan dan Kampung yang sudah melaksanakan program tersebut. Ketiga, membangun kerjasama antar Camat dan Kepala kampung sekitar dalam menata penyelenggaraan program Bunga Kampung dan Bunga Kampung Mekar di Dusun. Keempat, melakukan inventarisir kebutuhan sarana dan prasarana pendukung program dengan kapasitas anggaran yang ada pada tiap Kecamatan maupun Kampung.

3.3. Elemen *Change*

Dalam teori *Dynamic Governance System* (Neo & Chen, 2007:12), setelah elemen kapabilitas dan elemen budaya digabungkan, hasilnya adalah *change* (perubahan). Perubahan yang terjadi adalah hasil dari pengaruh dari budaya yang disebabkan oleh dinamika pemerintahan. *Change* dalam perspektif teori *Dynamic Governance System* yang digunakan adalah konsep perubahan yang positif, yaitu kebijakan yang dihasilkan akan adaptif sesuai perkembangan zaman. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tepat oleh aktor politik utama yakni Bupati dalam menyesuaikan kondisi di lapangan. Sejalan dengan teori tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berupaya untuk menyesuaikan berbagai program yang ada dengan berbagai perubahan agar program tersebut dapat menghadapi permasalahan pelayanan publik yang bersifat dinamis.

Pada akhirnya, perubahan berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi sebuah kebijakan yang adaptif dalam artian pengambilan keputusan yang tepat oleh aktor politik utama yakni Bupati. Hal tersebut tentunya harus bertahan terhadap perkembangan zaman yang terus berubah. Adapun perubahan berdasarkan hasil penelitian yaitu pertama, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menetapkan program turunan bernama Bunga Kampung Mekar di Dusun. Kedua, Bupati Lampung Tengah secara tidak langsung menggugah kinerja dari seluruh aparatur melalui pemberian contoh untuk turun di lapangan saat pelaksanaan pelayanan publik melalui Program Bunga Kampung. Ketiga, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengimbangi percepatan layanan dengan pencapaian infrastruktur melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Keempat, keberhasilan program yang membantu dan memudahkan pelayanan masyarakat tersebut, juga ditandai dengan diraihnya penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, kategori Program Pelayanan Jemput Bola untuk Jenis Pelayanan Terbanyak di Indonesia. Kelima, tercapainya berbagai target yang berkaitan dengan penyelenggaraan Misi ke – 5 Bupati Lampung Tengah. Keenam, survei kepuasan masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten

Lampung Tengah melalui program Bunga Kampung pada tahun 2022 adalah sebesar 81,25 sehingga SKM melalui program Bunga Kampung masuk pada kategori B (baik).

Hasilnya, melalui tahapan dalam memasukkan persepsi, refleksi, dan pengetahuan baru ke dalam keyakinan, aturan, program, dan struktur untuk memungkinkan solusi yang ada dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Segala keputusan Bupati yang diambil dalam suatu kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mengatasi permasalahan pelayanan publik melalui tata program Bunga Kampung mengalami perubahan berdasarkan kelima hasil yang dijelaskan pada uraian sub bab *change* diatas.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dalam penyelenggaraan program Bunga Kampung dinilai sudah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat di Lampung Tengah. Program ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik di tengah dinamika luas wilayah dengan penduduk padat, reformasi birokrasi yang belum terwujud dan pembangunan infrastruktur yang belum optimal. Penulis menemukan poin penting yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni pada penelitian ini menggunakan ketiga elemen dari teori *Dynamic Governance* (Neo & Chen, 2007) yang meliputi *Culture*, *Capabilities* dan *Change*.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sudah menerapkan teori tersebut dalam menjalankan pemerintahannya khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui program Bunga Kampung. Adapun tantangan terbesar dalam mewujudkan misi ke 5 “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” adalah kondisi luas wilayah dengan penduduk yang padat dan pembangunan infrastruktur yang belum optimal serta reformasi birokrasi yang belum terwujud. Oleh karena itu, political will Kepala Daerah dalam merealisasikan kampanye politiknya melalui penetapan visi misi serta program yang salah satunya Bunga Kampung harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel dengan membangun koordinasi serta pengambilan keputusan yang tepat dalam setiap aktivitas pemerintahan.

Bunga Kampung memiliki nilai tambah dalam pelayanan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sejak diperkenalkan kepada masyarakat. Ide yang dicetuskan Bupati Musa Ahmad ini bukan tanpa alasan. Kondisi geografis Lampung Tengah menjadi salah satu alasan hadirnya Bunga Kampung harus memenuhi hak warga tanpa adanya sekat jarak. Di sisi lain, kehadiran Bunga Kampung adalah bukti nyata kinerja Bupati dan jajarannya dalam menciptakan efektivitas layanan. Masyarakat yang begitu puas dengan layanan yang telah diberikan dan kepuasan ini menjadi tolok ukur bagaimana Bunga Kampung hadir tidak hanya sebagai agenda rutin. Bunga Kampung hadir menjadi jawaban bagi masyarakat yang belum mendapatkan layanan.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan dengan adanya Program Bunga Kampung menjadikan keselarasan antara janji kampanye politik dan tindakan Kepala Daerah terpilih dapat ditepati. Mengingat fenomena yang terjadi, hadirnya Program Bunga Kampung menyebabkan berbagai perubahan dalam kehidupan di tengah masyarakat seperti meningkatnya kesadaran akan pentingnya administrasi, pajak dan sebagainya. Dari aspek tata kelola pemerintahan sendiri terjadi berbagai peningkatan kinerja yang signifikan dari para aparatur, pelayanan publik yang semakin merata hingga pembangunan infrastruktur yang semakin efektif. Maka dari itu, pada hasil penelitian ini penelitian telah menganalisis dinamika Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dalam penyelenggaraan Program Bunga Kampung untuk merealisasikan janji kampanye politik terkait peningkatan serta pemerataan kualitas pelayanan publik dengan menggunakan perspektif dari teori *Dynamic Governance System* dari Neo dan Chen (2007).

Adapun hasil analisis tersebut yang terdiri dari elemen *culture* meliputi *state activism* (aktivitas negara), *long term* (rencana dan tujuan jangka panjang), dan *stability* (stabilitas); *capabilities* meliputi *thinking ahead* (berpikir ke depan), *thinking again* (mengkaji ulang) dan *thinking across* (belajar dari pengalaman negara/organisasi lain); serta elemen *change* untuk melihat bagaimana dinamika Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam penyelenggaraan Program Bunga Kampung untuk merealisasikan janji kampanye politik terkait peningkatan serta pemerataan kualitas pelayanan publik dilaksanakan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan ataupun penelitian dengan peneliti lainnya pada lokasi serupa berkaitan dengan program Bunga Kampung dan Bunga Kampung Mekar di Dusun di Kabupaten Lampung Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu kontribusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pj. Sekretaris Daerah Lampung Tengah, Kepala Bappeda Lampung Tengah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Camat Kota Gajah, Kepala Kampung Kota Gajah Timur, Kepala Kampung Purworejo dan masyarakat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Aligica, P. D., Boettke, P. J., & Tarko, V. (2019). *Dynamic Governance. In Public Governance and the Classical-Liberal Perspective*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190267032.003.0004>

Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992

Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance*. <https://doi.org/10.1142/6458>

Setiawan, A. (2022). BUNGA KAMPUNG “Bupati Ngantor di Kampung.”

Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.

B. JURNAL

Fajri, Yuni Kartika dkk. (2020). *Dynamic Governance* dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, Vol 2, 104-112.

Hidayat, Hisyam dkk. (2019). TINJAUAN *DYNAMIC GOVERNANCE* DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI (PBB) SETU BABAKAN MENUJU WISATA HALAL. *Jurnal Spirit Publik*, Vol 14, 136-153.

Ikhsan, Khairul dkk. (2020). IMPLEMENTASI *DYNAMIC GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BATAM. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol 3.

Sari, Amalia dan Rusli, Zaili. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (*Dynamic Governance*) dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Jurnal Administrasi Publik, Vol 5, 022-031.

Yanuar, Ferdy. (2023). Penerapan Dyanamic Governance terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi di Kota Depok Tahun 2022. Jurnal Pemerintahan dan Politik, Vol 8, 202-212.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 - 2026

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Bunga Kampung

D. WEBSITE

BPS Kabupaten Lampung Tengah. (2021a). Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah per Kecamatan. In Lampungtengahkab.Bps.Go.Id. <https://lampungtengahkab.bps.go.id/indicator/12/169/1/jumlahpenduduk-kabupaten-lampung-tengah-per-kecamatan.html>

BPS Kabupaten Lampung Tengah. (2021b). Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. In lampungtengahkab.bps.go.id/indicator/153/139/1/luas-wilayahmenurut-kecamatan-di-kabupaten-lampung-tengah.html

BPS Kabupaten Lampung Tengah. (2023). Data Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Tengah.

Ombudsman. (2021). Patuh Pelayanan Publik, 10 Daerah di Lampung Dapat Penghargaan dari Ombudsman. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--patuh-pelayanan-publik-10-daerah-di-lampung-dapat-penghargaan-dari-ombudsman>

Sukoco, B. M. (2023). Memulihkan Kepercayaan Publik. Kompas.Id. Publik